BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukannya survey dan analisis mengenai Pemilihan Prioritas Program Pengembangan Kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Isu-Isu Strategis di Kecamatan Belakang Padang

Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi daerahnya, ditemukan beberapa isu-isu strategis terkait pengembangan kawasan "Pulau Penawar rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam, yaitu:

1. Isu Geografis dan Pertahanan & Keamanan Kecamatan Belakang Padang yang sangat strategis yaitu berada pada posisi terdepan di Kota Batam dan berhadapan langsung dengan Selat Philip (jalur pelayaran internasional) dan Negara Singapura serta terdiri dari banyak pulau, serta pentingnya menjaga pertahan dan keamanan wilayah perbatasan;
2. Peran Kecamatan Belakang Padang sebagai kawasan *hinterland* bagi Kota Batam dan kecamatan terdepan yang menjadi pintu gerbang yang akan dilalui untuk menuju Kota Batam khususnya dari Singapura;
3. Nilai Historis Kecamatan Belakang Padang yang menjadi saksi sejarah pesatnya perkembangan Kota Batam hingga saat ini dan juga merupakan kecamatan pertama dan tertua di Kota Batam;
4. Kebudayaan Masyarakat Kecamatan Belakang Padang yang masih sangat kental menganut kebudayaan melayu dan juga masyarakatnya merupakan masyarakat tradisional;
5. Isu Potensi Kelautan Kecamatan Belakang Padang yang berupa budidaya perikanan, rumput laut, rengkam, terumbu karang buatan, hutan bakau/*mangrove* dan wisata pantai.

Isu-isu strategis tersebut melatarbelakangi pentingnya pengembangan pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Selain itu, isu-isu strategis tersebut juga merupakan faktor yang melatarbelakangi pertimbangan

perumusan kriteria penilaian dan prioritas program pengembangan kawasan "Pulau Penawar rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam.

5.1.2 Perumusan Kriteria- Kriteria Penilaian

Berangkat dari isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Belakang Padang, maka dirumuskanlah kriteria-kriteria penilaian untuk menentukan prioritas program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam. Adapum kriteria-kriteria yang telah dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis tersebut, yaitu:

1. **Pengembangan Berbasis Ekonomi Kelautan**, merupakan kriteria yang dikembangkan dari isu potensi kelautan Kecamatan Belakang Padang yang memiliki potensi kelautan yang memadai untuk dikembangkan demi meningkatkan perekonomian;
2. **Pengembangan Berbasis Pariwisata dan Kebudayaan**, yang memiliki nilai historis dan kebudayaan masyarakat yaitu kebudayaan Melayu. Mayoritas masyarakat yang masih merupakan masyarakat tradisional & memiliki karakteristik tersendiri. Kriteria ini merupakan kriteria yang berangkat dari isu nilai historis, kebudayaan masyarakat dan potensi kelautan di Kecamatan Belakang Padang;
3. **Pengembangan Berbasis Pelestarian Ekosistem Laut**, ekosistem laut seperti *mangrove* dan terumbu karang yang perlu dilestarikan demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan makhluk hidup. Kriteria ini merupakan kriteria yang dirumuskan berdasarkan isu potensi kelautan Kecamatan Belakang Padang;
4. **Pengembangan Berbasis Pertahanan dan Keamanan**, wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perlindungan dan pertahanan khusus demi menjaga keutuhan wilayah NKRI serta karakteristiknya yang juga terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang rawan hilang dari wilayah NKRI. Kriteria ini merupakan kriteria yang dirumuskan berdasarkan isu mengenai peran Kecamatan Belakan Padang serta isu mengenai letak dan geografis Kecamatan Belakang Padang.

5.1.3 Perumusan Alternatif Program Pengembangan

Perumusan alternatif program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang Sebagai Kecamatan Terdepan di Kota Batam didasarkan pada karakteristik wilayahnya, serta program-program pengembangan yang terdapat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kecamatan Belakang Padang, serta Matriks Rencana dan Program di Lokasi Prioritas Perbatasan Kota Batam. Program-program pengembangan dari berbagai sumber tersebut kemudian diselaraskan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah Kecamatan Belakang Padang. Adapun alternatif program pengembangan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat;
2. Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan;
3. Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*;
4. Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu;
5. Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan;
6. Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
7. Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau- Pulau Terluar/Terdepan.

5.1.4 Hasil Penilaian Terhadap Alternatif Program Pengembangan dengan Menggunakan Metode AHP

Penilaian terhadap alternatif program pengembangan kawasan "Pulau Penawar Rindu" Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam ini menggunakan metoda AHP dan dianalisis menggunakan *software Expert Choice 11*, dimana hasil prioritas program pengembangannya sebagai berikut:

1. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi adalah **Prioritas Program Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau-Pulau**

Terluar/Terdepan dengan bobot sebesar 0,236. Prioritas program Pengawasan Perairan, Pengadaan & Rehabilitasi Infrastruktur Keamanan dan Pembangunan Tugu/Prasasti Pulau – Pulau Terluar/Terdepan mencakup beberapa sub-program, yaitu:

a. Mempertahankan nilai strategis kawasan yang sangat menentukan dalam menarik batas negara;
b. Mempertahankan nilai strategis kawasan dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan wilayah kelautan Indonesia dengan tersedianya lokasi untuk dibangun pos/ pelabuhan tambat bagi Angkatan Laut Republik Indonesia sebagai patroli keamanan perbatasan dan pengaman pelayaran agar lebih terjamin;
c. Pengadaan Kapal Patroli Perbatasan;
d. Pelaksanaan Pengawasan Perairan Wilayah Kecamatan Belakang Padang;
e. Pengadaan Kapal/*Speedboat Surveyor* Batas Laut;
f. Penataan Revitalisasi Kawasan, Pembangunan Menara/Tugu Perbatasan Pulau Pelampung;
g. Rehabilitasi Gedung Koramil Belakang Padang;
h. Pengadaan Kendaraan Roda Empat Operasional Pengawasan Perbatasan;
i. Pembangunan Prasasti Pulau-Pulau Terluar/Terdepan di Provinsi Kepulauan Riau.

2. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-dua adalah **Prioritas Program Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan** dengan bobot sebesar 0,205. Prioritas Program Pemberdayaan Nelayan & Pengembangan Budidaya Perikanan mencakup sub-program sebagai berikut:
   a. Pemberdayaan nelayan, pembudidayaan ikan dan masyarakat pesisir kelautan dan perikanan lainnya;
   b. Pengembangan dan pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   c. Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

d. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan;
e. Optimalisasi pengolahan, pengelolaan, dan pemasaran produk perikanan;
f. Pengembangan kegiatan perikanan skala besar.

3. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-tiga adalah **Prioritas Program Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata** dengan bobot sebesar 0,172. Prioritas Program Pengembangan & Peningkatan Fasilitas dan Aksesibilitas Kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata terdiri dari beberapa sub-program, yaitu:
   a. Pengembangan dan penataan pelabuhan utama angkutan antar pulau Kota Batam;
   b. Pengadaan pelantar penghubung pulau-pulau yang saling berdekatan;
   c. Pengadaan perahu antar pulau di Kota Batam;
   d. Peningkatan aksesibilitas menuju objek wisata;
   e. Pengadaan kapal-kapal wisata;
   f. Pengembangan kawasan wisata bahari;
   g. Pengembangan kawasan ekowisata;
   h. Pengadaan Fasilitas Rekreasi yaitu Bangunan Hotel dan Restoran.
4. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-empat adalah **Prioritas Program Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove*** dengan bobot sebesar 0,125. Prioritas Program Perlindungan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau/*Mangrove* mencakup sub-program Penetapan dan perlindungan kawasan suaka alam hutan bakau/*mangrove*.
5. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-lima adalah **Prioritas Program Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu** dengan bobot sebesar 0,094. Prioritas Program Pengembangan Industri Kerajinan & Industri Makanan Khas Melayu terdiri dari beberapa sub-program, yaitu:
   a. Pengembangan sentra industri kerajinan yang diarahkan di sentra-sentra kegiatan pariwisata;

b. Pengembangan industri makanan khas melayu yang diarahkan di lokasi-lokasi perumahan penduduk yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pariwisata.

6. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-enam adalah **Prioritas Program Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat** dengan bobot sebesar 0,085. Prioritas Program Pembinaan, Perlindungan Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Perkampungan Tua & Komunitas Adat mencakup sub-program sebagai berikut:
   a. Perlindungan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil;
   b. Penyuluhan, bimbingan, pelayanan dan bantuan pembinaan Komunitas Adat Terpencil;
   c. Penataan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi penduduk Perkampungan Tua.
7. Prioritas program yang memiliki bobot tertinggi ke-tujuh adalah **Prioritas Program Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan** dengan bobot sebesar 0,084. Prioritas Program Peningkatan Promosi Daerah Melalui Even Rutin Tahunan terdiri dari sub-program Pelestarian dan pengembangan lomba perahu layar dan kesenian Melayu.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi untuk pemerintah, serta masukan untuk studi lanjutan mengenai penelitian ini yaitu:

1. Prioritas program pengembangan kawasan “Pulau Penawar Rindu” Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam yang telah didapatkan melalui hasil analisis dengan menggunakan metode AHP, dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Batam agar program-program tersebut dapat berjalan dengan optimal dalam mengarahkan ‘Pulau Penawar Rindu’ Kecamatan Belakang Padang sebagai kecamatan terdepan di Kota Batam;

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi pembanding dan masukan bagi pulau-pulau terluar lainnya dalam pengembangan kawasannya dengan menyesuaikan kembali terhadap karakteristik masing-masing wilayah;

5.3 Saran Studi Lanjutan

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, sehingga apabila terdapat studi lanjutan mengenai penelitian ini, berikut saran-saran yang dapat dijadikan masukan:

1. Alternatif yang diajukan dalam penelitian ini didasarkan pada program-program pengembangan yang tercantum dalam rencana-rencana pengembangan daerah, sehingga apabila terdapat studi lanjutan mengenai penelitian ini, dapat diperluas sumber-sumber perumusan prioritas program pengembangannya, seperti pengembangan berdasarkan persepsi masyarakat dan kemudian dikombinasikan dengan program-program pengembangan daerah;
2. Penilaian menggunakan metode AHP ini merupakan penilaian yang mengandalkan persepsi seorang ahli yang dalam hal ini melibatkan subyektifitas seorang ahli. Selain itu jawaban para ahli tersebut sangat berfariasi sesuai dengan pendapat mereka, sehingga penambahan pendapat beberapa ahli dengan sumber-sumber yang lebih luas dapat dilakukan guna menjaga konsistensi data dan hasil analisisnya.